

Digitalisasi Pelaporan Realisasi Penggunaan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kota Palembang

Faradillah*¹, Muhammad Fadhiel Alie², Rian Rahmanda Putra³

^{1,2}Program Studi Sistem Informasi, Universitas Indo Global Mandiri

Jalan Jenderal Sudirman No. 629 Palembang

e-mail: *faradillah.hakim@uigm.ac.id, fadhiel@uigm.ac.id, rianrahmanda@polsri.ac.id

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan memang merupakan pekerjaan rumah (PR) besar bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Program penanggulangan kemiskinan sering kali rentan terhadap penyelewengan karena berbagai faktor, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. Penelitian ini melakukan digitalisasi pelaporan realisasi penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan berbasis web melalui beberapa fitur visualisasi data dan analisis menunjukkan peta penerima bantuan, kondisi kesejahteraan, hingga penyerapan dana dalam program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan Kota Palembang melalui pembangunan Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK) secara komprehensif menggunakan Software Development Life Cycle dalam metode pengembangan sistem. Pembangunan SIDAK ini menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang sebelumnya dinamakan dengan Basis Data Terpadu (BDT), data pengajuan anggaran dan program penanggulangan kemiskinan dari seluruh OPD di Kota Palembang sebagai sumber data sesuai dengan Nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan pada bagian rancangan ini mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Kata kunci— SIDAK, Kemiskinan, Palembang

Abstract

Poverty reduction is indeed a big homework for countries around the world, including Indonesia. Poverty reduction programs are often vulnerable to abuse due to various factors, such as a lack of transparency, accountability and effective supervision. This research digitizes web-based reports on the realization of the use of poverty reduction budgets through several data visualization and analysis features showing maps of aid recipients, welfare conditions, and absorption of funds in Palembang City poverty reduction programs and activities through the development of a comprehensive Poverty Data Information System (SIDAK) using Software Development Life Cycle in system development methods. This SIDAK development uses DTKS (Integrated Social Welfare Data) which was previously called the Integrated Data Base (BDT), data on budget submissions and poverty reduction programs from all OPDs in Palembang City as a data source in accordance with the nomenclature of programs, activities and sub-activities in this part of the design. referring to Minister of Home Affairs Regulation no. 90 of 2019.

Keywords— SIDAK, Poverty, Palembang

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan kota merupakan masalah sosial yang signifikan dengan dampak yang luas, termasuk kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan stabilitas sosial[1], [2]. Oleh karena itu, memahami akar penyebab, dampak, dan solusi untuk kemiskinan kota sangat penting bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemiskinan kota seringkali menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Dengan memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan kota, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mengatasi masalah tersebut[1], [3]. Memahami dinamika kemiskinan kota dapat membantu merancang program-program intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat[3].

Menurut Badan Pusat Statistik garis kemiskinan Kota Palembang tahun 2023 berada pada angka 643.356 (dalam rupiah/kapita/bulan) dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 179,45 (dalam ribu) jiwa, berbeda pada tahun 2022 kota Palembang berada pada angka 597.136 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 181,65 (dalam ribu) jiwa. Bila dilihat garis kemiskinan maka garis kemiskinan Kota Palembang meningkat sebesar 46.220 (dalam rupiah/kapita/bulan) namun bila dipersentasekan angka kemiskinan kota Palembang mengalami penurunan sebesar 0,26% yaitu dari 10,48% menjadi 10,22%[4]. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah penduduk sebanyak 2200 jiwa dari tahun 2022 hingga tahun 2023[4], [5]. Hal ini menunjukkan bahwa garis kemiskinan yang meningkat setiap tahunnya menjadi suatu fenomena yang perlu diantisipasi mengingat angka kematian yang tidak menentu setiap tahunnya, menjadi variabel yang tidak dapat menjadi patokan penurunan angka kemiskinan di Kota Palembang. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang sudah dilakukan oleh semua pihak melalui kegiatan maupun program yang sudah disusun oleh beberapa OPD di Kota Palembang. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan kota, dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas hidup dan kesempatan bagi warga kota untuk berkembang. Mengatasi kemiskinan kota adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama target-target yang terkait dengan pengentasan kemiskinan[6], [7].

Permasalahan yang terjadi terkait dengan dana kemiskinan bisa sangat beragam dan kompleks, Salah satu masalah utama adalah ketidakseimbangan antara alokasi dana dan kebutuhan nyata masyarakat miskin[8]. Dana kemiskinan mungkin tidak dialokasikan secara proporsional atau tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, Masyarakat miskin sering menghadapi hambatan dalam mengakses dana kemiskinan, baik itu karena prosedur yang rumit, birokrasi yang lambat, atau kurangnya informasi tentang program-program yang tersedia[6], [7], [8]. Tanpa pemantauan yang tepat, sulit untuk mengetahui apakah dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran, Dana kemiskinan rentan terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa terjadi melalui praktik korupsi, pemborosan anggaran, atau penggunaan dana untuk kepentingan politik atau pribadi, Program-program kemiskinan yang tidak efektif atau tidak berkelanjutan dapat menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan di antara penerima bantuan. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mandiri dan meraih kesejahteraan jangka Panjang, Sumber-sumber pendanaan untuk program-program kemiskinan seringkali tidak stabil atau tidak terjamin dalam jangka panjang. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program dan mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan[1], [2], [6], [7], [8]. Dengan menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kemiskinan, kita dapat mengurangi risiko penyelewengan dan meningkatkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan tepat dan tepat sasaran[3], [6], [7], [9], [10].

Digitalisasi memungkinkan penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data secara lebih efisien dan akurat. Ini membantu pemerintah kota untuk memahami dengan lebih baik bagaimana anggaran penanggulangan kemiskinan digunakan dan efektivitasnya dalam mengurangi tingkat

kemiskinan[3], [7], [9], [10]. Melalui platform digital, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan[3], [6], [9], [10], [11], [12].

Penelitian sejenis sebelumnya telah banyak membahas tentang digitalisasi data kemiskinan dalam suatu sistem informasi namun hanya berfokus pada identifikasi, pemetaan, dan pendataan tingkat kemiskinan. Pada penelitiannya tahun 2021 Bahaudin melakukan klasterisasi provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat kemiskinan, hasil penelitian menunjukkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia namun belum menampilkan urgensi pelaporan digital terkait dana kemiskinan[13]. Penelitian Bagye dkk menampilkan data persebaran masyarakat miskin berdasarkan wilayah dusun memanfaatkan sistem informasi geografis, hasil penelitian Bagye dkk terbatas pada tampilan titik lokasi masyarakat kurang mampu belum terdapat informasi lainnya terkait upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut [14] Pada penelitian yang dilakukan Damuri dkk melakukan klasifikasi kelayakan penerima bantuan sembako berdasarkan data kemiskinan berdasarkan algoritma *Naive Bayes* [8]. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani juga memanfaatkan aplikasi pengolah data kemiskinan sebagai sistem informasi kesejahteraan sosial, penelitian ini terbatas pembangunan *database* kemiskinan terpadu yang selanjutnya diusulkan untuk menambahkan fitur perbaikan dan pengusulan data bantuan sosial[8]. Penelitian Fatmawati dkk menganalisis penggunaan sistem informasi kesejahteraan sosial dalam pengurusan dan pengelolaan data bantuan sosial masyarakat miskin sebagai bentuk evaluasi efektivitas penggunaan sistem dalam mengolah data kemiskinan[15]. Berdasarkan keterbatasan penelitian sejenis terdahulu, penelitian ini mencoba mengusulkan suatu sistem informasi data kemiskinan yang dapat mengakomodir pelaporan realisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif melalui analisis data kegiatan, realisasi serapan dana yang digunakan dan titik daerah yang menjadi lokasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ditampilkan melalui peta kelurahan.

Dengan memiliki data yang lebih akurat dan terkini, pemerintah kota dapat merancang program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat[1], [2], [8], [16], [17]. Dengan digitalisasi, semua informasi terkait dengan penggunaan dana kemiskinan dapat dicatat dan diakses secara mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum[10], [18]. Hal ini dapat menciptakan tingkat transparansi yang lebih tinggi, di mana semua orang dapat melihat bagaimana dana tersebut digunakan dan untuk tujuan apa. Sistem pelaporan digital memungkinkan pemantauan penggunaan dana secara *real-time*[19], [20], [21]. Ini memungkinkan pihak berwenang untuk secara cepat mengidentifikasi potensi penyelewengan atau penyalahgunaan dana dan mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. Proses pelaporan menjadi lebih akurat karena data dapat dimasukkan langsung ke dalam sistem tanpa perlu melalui banyak tahap manual[1], [3], [7]. Hal ini mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa informasi yang dilaporkan lebih terpercaya. Data yang terkumpul melalui sistem pelaporan digital dapat dianalisis secara lebih mendalam untuk memahami pola-pola penggunaan dana kemiskinan, mengidentifikasi tren, dan menentukan efektivitas program-program tertentu[22], [23], [24], [25]. Hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan alokasi dana di masa depan[9], [26], [27]. Dengan akses yang lebih mudah ke informasi tentang penggunaan dana kemiskinan, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi. Selain itu hal tersebut juga dapat menciptakan tekanan tambahan pada pihak berwenang untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut[28]. Digitalisasi dapat menyederhanakan proses pelaporan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah[3], [6], [12], [29], [30].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu perumusan masalah yang dilakukan sebagai tahap awal melalui analisis kondisi yang berjalan sekaligus analisis kebutuhan pengguna terhadap sistem yang sudah ada. Selanjutnya perancangan solusi dari permasalahan

yang diangkat pada penelitian ini melalui pengembangan SIDAK sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan Analisa kondisi melalui penerapan SDLC (*Software Development Life Cycle*). Tahap ketiga merupakan tahap pengumpulan dan analisis data yang dalam hal ini sesuai kebutuhan Bappeda Litbang Kota Palembang sebagai User dan sesuai dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah[30].

2.1 *Software Development Life Cycle (SDLC)*

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi[31]. Ini adalah serangkaian proses yang terstruktur untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan bisnis yang ditentukan dan memiliki kualitas yang diinginkan[31]. Tujuan utama dari SDLC adalah untuk menciptakan sistem informasi yang efisien, dapat diandalkan, dan dapat dioperasikan dengan baik. SDLC mencakup serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh tim pengembangan perangkat lunak dari konsepsi ide sampai penerapan dan pemeliharaan sistem. Tahapan-tahapan umum dalam SDLC termasuk perencanaan, analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan operasi/pemeliharaan.[31], [32]. SDLC membantu organisasi memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan bisnis, beroperasi secara efektif, dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis atau teknologi di masa depan. Hal ini juga membantu mengurangi risiko dalam pengembangan perangkat lunak dengan memastikan bahwa proses pengembangan terdokumentasi dan terstruktur dengan baik[31], [32], [33].

Tahapan-tahapan dalam SDLC bervariasi tergantung pada model pengembangan perangkat lunak yang digunakan, tetapi secara umum, SDLC biasanya mencakup tahapan-tahapan antara lain: Tahap Perencanaan (*Planning*) pada penelitian ini dilakukan Identifikasi masalah atau peluang bisnis melalui wawancara bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan observasi langsung terhadap sistem yang telah digunakan di Bappeda Litbang Kota Palembang saat ini untuk menentukan ruang lingkup proyek dan rencana pengembangan proyek yang mencakup sumber daya, jadwal, dan anggaran. Pada tahap ini juga dilakukan analisis risiko dan rekomendasi solusi untuk beberapa kemungkinan risiko proyek. Selanjutnya dilakukan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) yang mencakup evaluasi kelayakan proyek dari sudut pandang teknis, operasional, ekonomi, dan jadwal, penentuan apakah proyek layak untuk dilanjutkan melalui *Forum Group discussion (FGD)* bersama pihak terkait seperti kepala bagian dan perwakilan OPD. Selanjutnya Tahap Analisis (*Analysis*) dilakukan Identifikasi kebutuhan bisnis dan pengguna yaitu operator dari masing-masing OPD dan operator Bappeda Litbang Kota Palembang yang dilakukan melalui analisis proses bisnis yang ada, penyusunan dokumen kebutuhan yang jelas dan komprehensif yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan modul manual penggunaan sistem. Selanjutnya merupakan Tahap Perancangan (*Design*) yang mencakup perancangan arsitektur sistem dan infrastruktur teknologi yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, selanjutnya Tahap Pengembangan (*Development*) mencakup: Implementasi desain menjadi kode perangkat lunak yang sebenarnya, Pengembangan modul atau komponen perangkat lunak, Uji unit untuk memastikan bahwa setiap komponen berfungsi dengan benar. Tahap selanjutnya adalah Pengujian (*Testing*) melalui penerapan pendekatan black box yang dilakukan oleh beberapa pihak yang mewakili kepala dinas Bappeda Litbang Kota Palembang yaitu PPK, kepala bagian dan beberapa kepada seksi terkait proyek pengembangan SIDAK. Tahapan yang utama adalah tahap Implementasi (*Implementation*) yang mencakup: Peluncuran sistem yang dilakukan dengan mengundang semua OPD terkait, Kepala Dinas Bappeda Litbang Kota Palembang, PPK, kepala bidang, kepala bagian, perwakilan akademisi dan pihak terkait lainnya. Peluncuran SIDAK dilakukan di Ruang Rapat lantai 3 Gedung Bappeda Litbang Kota Palembang. Tahapan terakhir merupakan Tahap Pemeliharaan perangkat lunak termasuk perbaikan bug dan pembaruan fungsionalitas dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pengguna [31], [32], [33], [34].

2. 2 Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah kombinasi dari berbagai komponen yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi [6], [9], [12], [27]. Komponen-komponen utama dalam sebuah sistem informasi meliputi: *hardware*, software, data, proses, manusia (Pengguna) [3], [6], [9], [12], [27]. Pengguna bisa menjadi pengguna internal seperti karyawan atau manajemen, atau pengguna eksternal seperti pelanggan atau mitra bisnis, Jaringan (*Network*): Jaringan merupakan infrastruktur yang menghubungkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi [16], [25], [27], [35], [36]. Ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara komponen-komponen sistem informasi, baik di dalam maupun di luar organisasi, Kebijakan dan Prosedur [9], [10], [11], [27].

2. 3 Sistem Informasi Data Kemiskinan

Sistem informasi data kemiskinan merupakan sebuah sistem informasi yang dapat mengolah dan menampilkan data kemiskinan. Data yang dimaksud adalah data terpadu tentang rumah tangga dan individu miskin dari TNP2K adalah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang sebelumnya dinamakan dengan Basis Data Terpadu (BDT). DTKS seharusnya dijadikan acuan penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan sehingga seluruh stakeholder di Kota Palembang memiliki sasaran yang sama. Kota Palembang saat ini sudah membangun Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK) yang datanya bersumber dari data terpadu ini. SIDAK yang berjalan saat ini menampilkan data individu dan rumah tangga miskin dan penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk tabular dan grafik. Beberapa kondisi terjadi setelah SIDAK selesai dibangun diantaranya: perubahan sumber data dan variabel dari BDT menjadi DTKS, perlunya sistem informasi perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang, dan analisa pergerakan data status kesejahteraan rumah tangga dari BDT 2018 ke DTKS 2020 hingga DTKS 2023. Kondisi-kondisi tersebut harus bisa diakomodir oleh SIDAK sehingga dibutuhkan pengembangan Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK) Kota Palembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

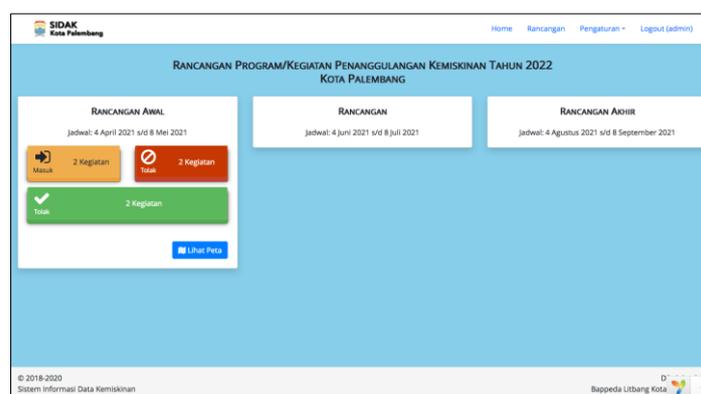
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan identifikasi masalah diperoleh beberapa kebutuhan pengguna dalam hal ini merupakan Bappeda Kota Palembang dan beberapa OPD terkait. Ringkasan hasil analisis kebutuhan dan identifikasi permasalahan serta rancangan solusi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan hasil analisis kebutuhan serta ruang lingkup rancangan solusi

1.	Analisis Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk membantu penyusunan Rancangan APBD. • Analisa pergerakan data kesejahteraan sosial dari setiap versi data secara agregat dan BNBA. • Integrasi dengan Geoportal Kota Palembang
----	--------------------	---

2.	Ruang Lingkup pengembangan system	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan mulai dari Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019. • Pembaharuan variabel BDT yang ditampilkan di SIDAK disesuaikan dengan DTKS 2020. • Penyesuaian variabel DTKS 2020 dengan BDT 2018. • Analisa pergerakan BDT 2018 ke DTKS 2020 secara agregat dan BNBA untuk variabel dan status kesejahteraan. • Integrasi dengan geoportal kota Palembang.
3.	Standar yang Digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 dan 6: Pengecualian informasi publik. • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26: Perlindungan hak pribadi. • PP No. 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 15: Kerahasiaan data Pribadi. • Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. • SK Mensos No. 284/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

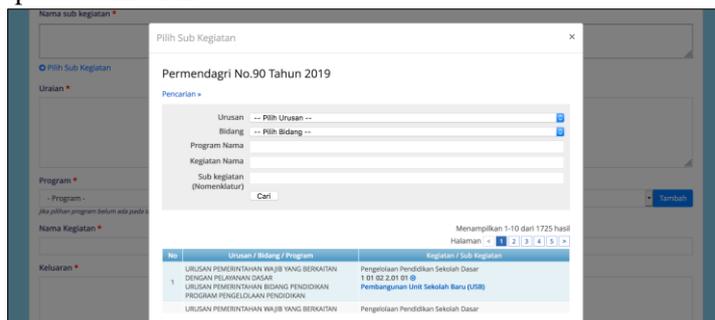
Berdasarkan Tabel 1 dilakukan perancangan solusi melalui pengembangan sistem informasi data kemiskinan. Tahap awal dilakukan penyamaan persepsi tentang data dan entitas SIDAK. Selanjutnya akan dilakukan rapat terkait kegiatan mana saja yang akan disetujui oleh Bappeda Kota Palembang terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang. Dengan adanya SIDAK, proses pengajuan kegiatan hingga pelaporan realisasi dapat secara transparan dipantau dan didokumentasikan. Rancangan program/kegiatan yang sudah diinput, disetujui dan ditolak akan tampil pada Fitur rancangan pada SIDAK. Fitur rancangan pada SIDAK ditunjukkan oleh Gambar 1.



Gambar 1 Rancangan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

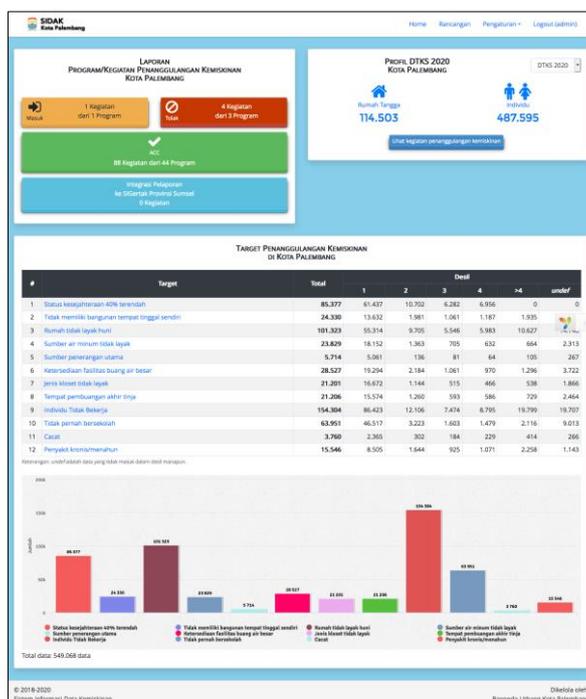
Pada Gambar 1 dapat dilihat beberapa informasi yaitu: rancangan awal yang berisi jumlah kegiatan yang masuk, jumlah kegiatan yang ditolak dan total kegiatan yang telah diproses. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 terdapat 2 kegiatan yang masuk dan semua kegiatan tersebut ditolak sehingga terdapat total 2 kegiatan yang telah ditolak. Selanjutnya Rancangan dan rancangan akhir yang berisi jadwal pelaksanaan kegiatan dengan term waktu yang telah ditentukan sehingga semua proses kegiatan/program penanggulangan kemiskinan mulai dari pengajuan, pelaksanaan hingga pelaporan akan terpantau melalui SIDAK.

Setiap tahap rancangan memiliki jadwal dan OPD hanya bisa memasukkan program/kegiatan pada jadwal tahap rancangan yang sudah diatur. Kesalahan ketik dan penempatan program/kegiatan dapat dikurangi dengan fitur “pilih urusan” dan “pilih bidang” ini yang dapat dilihat pada Gambar 2.



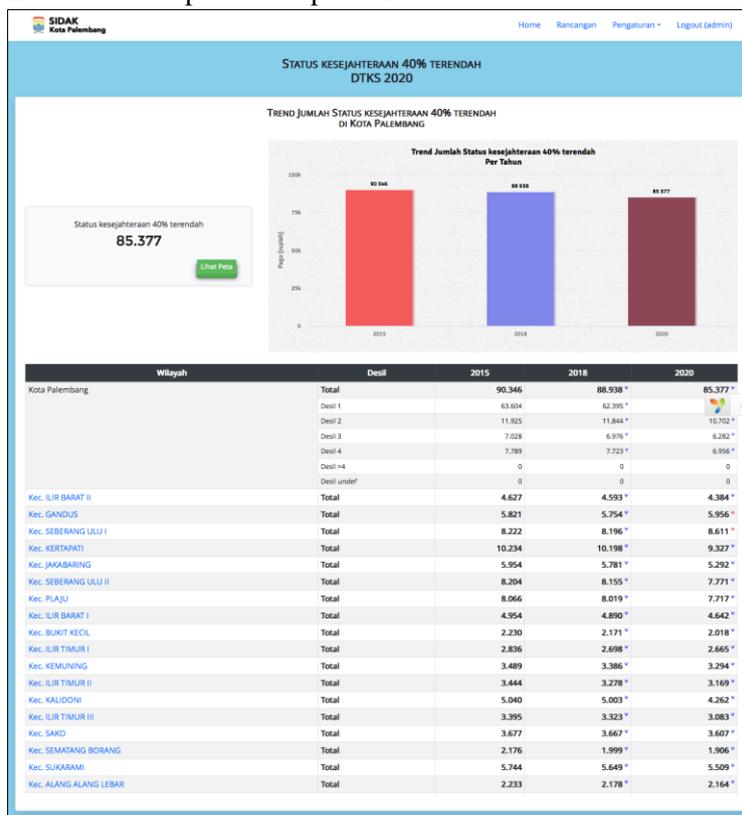
Gambar 2 Pemilihan Program/Kegiatan yang Sesuai Sengan Permendagri No. 90 Tahun 2019[30]

Pada Gambar 2 dapat bahwa dilihat OPD memasukkan program/kegiatan dengan memilih nomenklatur program/kegiatan yang ada dalam SIDAK. Program/kegiatan pada fitur ini mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019[30]. Tampilan laporan digital kegiatan/program penanggulangan kemiskinan Kota Palembang secara keseluruhan pada SIDAK dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Laporan digital kegiatan/program penanggulangan kemiskinan Kota Palembang secara keseluruhan pada SIDAK

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa secara digital terlapor proses kegiatan/program penanggulangan kemiskinan Kota Palembang yang dapat dilihat pada pojok kiri atas Gambar 3. Terdapat beberapa fitur laporan yaitu: rincian kegiatan berdasarkan program yang masuk pengajuan pada SIDAK, total kegiatan dan asal program yang ditolak, rekapitulasi jumlah kegiatan dan asal program yang diterima (ACC) oleh Bappeda Litbang serta fitur integrasi pelaporan SIDAK dengan SiGertak Provinsi Sumatera Selatan untuk memudahkan sinkronisasi pelaporan data kemiskinan provinsi Sumatera Selatan. Rekapitulasi profil DTKS Kota Palembang secara rinci berdasarkan Rumah Tangga dan Individu juga ditampilkan secara digital pada SIDAK. Pada Gambar 6 juga dapat dilihat data target penanggulangan kemiskinan lengkap dengan 12 aspek dengan data tampilan per desil. Salah satu aspek yang ditampilkan adalah Profil Status Kesejahteraan 40% terendah. Profil Status Kesejahteraan 40% terendah diperoleh melalui rekapitulasi data per kecamatan se Kota Palembang. Tampilan Backend Profil Status Kesejahteraan 40% terendah dapat dilihat pada Gambar 4.



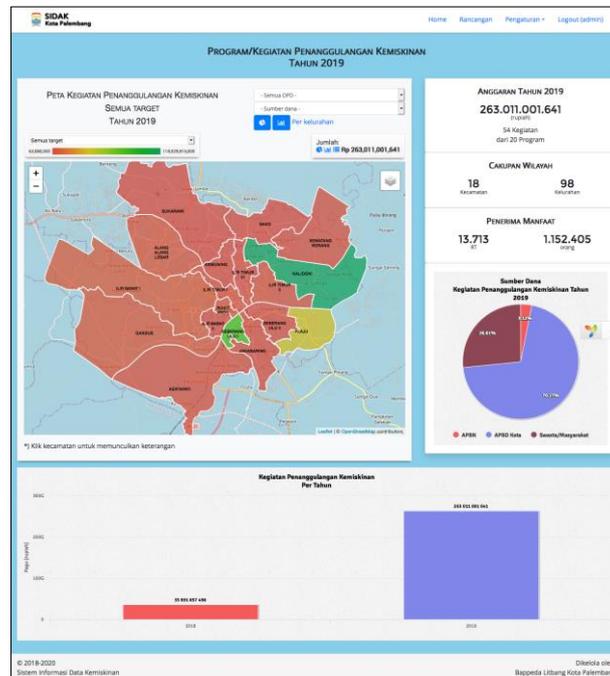
Gambar 4 Tampilan Backend Profil Status Kesejahteraan 40% terendah

Data per tahun dapat dipilih menggunakan tombol Dropdown DTKS Tahun Data seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Tampilan Profil DTKS 2020 yang dimasukkan ke peta SIDAK

Pada Gambar 5 dapat dilihat tampilan Profil DTKS 2020 yang dimasukkan ke peta SIDAK berdasarkan rumah tangga dan individu, terdapat fitur “lihat kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk data kegiatan yang sedang dilakukan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Analisa pergerakan data kesejahteraan sosial dari BDT 2015 sampai DTKS 2023 dalam bentuk grafik batang dan agregat rumah tangga yang tetap, baru dan keluar. Selain itu terdapat juga pilihan tahun data yang akan ditampilkan dengan fitur *dropdown* pilihan DTKS_Tahun yang dipilih. Integrasi GIS melalui peta program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Kota Palembang secara keseluruhan pada sisi Backend dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6 Tampilan Backend Penanggulangan Kemiskinan

Pada Gambar 6 dapat dilihat peta kegiatan kegiatan penanggulangan kemiskinan semua target per tahun lengkap dengan besaran anggaran tahunan, cakupan wilayah, penerima manfaat, sumber dana kegiatan penanggulangan kemiskinan per tahun yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu: APBN, APBD Kota, dan Swasta/Masyarakat yang digambarkan melalui diagram pie dalam persentase.

4. KESIMPULAN

Digitalisasi pelaporan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan dibangun berbasis web sebagai salah satu upaya transparansi dan akuntabilitas Bappeda Litbang, OPD terkait terhadap realisasi rancangan dan penggunaan dana penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat Kota Palembang secara luas untuk menghindari tindakan penyelewengan dan indikasi pelanggaran serta penyimpangan dana kemiskinan Kota Palembang. Tampilan dan spesifikasi SIDAK sesuai dengan lingkup kebutuhan (misal fitur pengelolaan akun OPD, penambahan peta kecamatan, penajaman program penanggulangan kemiskinan) dan sesuai dengan Nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan pada bagian rancangan ini mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019.

5. SARAN

Pada SIDAK yang telah dibangun saat ini menggunakan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagai acuan, kedepannya dibutuhkan pemeliharaan dan pembaruan fitur yang dapat disesuaikan dengan acuan peraturan maupun kebijakan yang terbaru. Analisis data yang ditampilkan saat ini pada SIDAK hanya terbatas pada pergerakan data kesejahteraan sosial dari BDT, tahap selanjutnya dapat menambahkan data stunting maupun data lainnya terkait penanggulangan kemiskinan Kota Palembang maupun secara umum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. I. Febianto and N. Palasara, "Analisa Clustering K-Means Pada Data Informasi Kemiskinan Di Jawa Barat Tahun 2018," *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, vol. 8, no. 2, pp. 130–140, Aug. 2019, doi: 10.32736/sisfokom.v8i2.653.
- [2] M. Humalangi *et al.*, "EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI GORONTALO TAHTA MEDIA GROUP," 2023.
- [3] Y. Andriani, S. Suwitri, and T. Yuniningsih, "Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan," *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, vol. 11, no. 2, pp. 129–147, Nov. 2023, doi: 10.34010/agregasi.v11i2.11255.
- [4] Badan Pusat Statistik Kota Palembang, "Profil Kemiskinan di Kota Palembang Maret 2023," pp. 1–11, Nov. 23, 2023.
- [5] Y. A. Noegraha, B. Supriadi, and Y. Nurmasari, "Kota Palembang Dalam Angka 2024," Palembang, 2024.
- [6] I. Putu Hendrajaya, I Gede, J. E. Putra, and P. Krisna Julihartha, "SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN PADA DESA SULANGAI BERBASIS WEB," 2020.
- [7] I. Sistem *et al.*, "SENTIMAS: Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Implementation of Information Systems for Receiving Assistance at the Website-Based Prailiu Village Office." [Online]. Available: <https://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas>
- [8] A. Damuri, U. Riyanto, H. Rusdianto, and M. Aminudin, "Implementasi Data Mining dengan Algoritma Naïve Bayes Untuk Klasifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Sembako," *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, vol. 8, no. 6, p. 219, Dec. 2021, doi: 10.30865/jurikom.v8i6.3655.
- [9] I. Sopiandi, "SISTEM INFORMASI PENDATAAN PENDUDUK MISKIN BERBASIS WEB," *Sistem Informasi*, vol. 7, no. 2, pp. 97–103, 2020.
- [10] N. Alamsyah, W. Erpurini, and F. Setiawan, "Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Berbasis Website Untuk Pemetaan Objek Wisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pada Kota Bandung," *Jurnal Sains Sosio Huaniora P-ISSN*, vol. 5, pp. 2580–1244, 2021.
- [11] "HALAMAN JUDUL RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SDGS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DESA DENGAN WEBGIS BERBASIS FLASK-PYTHON."
- [12] K. Auliasari and R. Primaswara, "SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS MONOGRAFI KECAMATAN KEDUNGKANDANG MENGGUNAKAN METODE K-MEANS," 2022.
- [13] A. Bahauddin, A. Fatmawati, and F. P. Sari, "Analisis Clustering Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Tingkat Kemiskinan Menggunakan Algoritma K-Means," *JURNAL MANAJEMEN INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI*, vol. 4, no. 1, pp. 1–8, 2021.

- [14] W. Bagye, L. Z. Haqiqi, and M. Ashari, "Sistem Informasi Geografis Persebaran Masyarakat Miskin (Damaskin) di Desa Monggas berbasis Web," *Jurnal Manajemen informatika & Sistem Informasi*, vol. 2, no. 2, 2019, [Online]. Available: <http://ejournal.stmiklombok.ac.id/index.php/misi>
- [15] F. Wati, J. N. Utamajaya, and A. Pratama, "Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kelurahan Gunung Seteleng Menggunakan Framework TAM," *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, vol. 9, no. 2, p. 492, Apr. 2022, doi: 10.30865/jurikom.v9i2.4057.
- [16] A. Muhariya, B. Widada, S. Siswanti, and S. Sinar Nusantara Surakarta, "Monitoring Program Keluarga Harapan Berbasis Mobile GIS Menggunakan K-Means Clustering Family Hope Program Monitoring Based on Mobile GIS Using K-Means Clustering," 2021.
- [17] "5911-Article Text-26811-1-10-20230616".
- [18] M. Haryanto and U. Kristen Satya Wacana Salatiga, "Pratyaksa Ocsa Nugraha Saian," 6720.
- [19] E. Saptaputra, V. J. Basiroen, and D. E. Septian, "Digitalization of Small Batik Industry: UI/UX design to support Batik Lasem e Commerce," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, IOP Publishing Ltd, Aug. 2021. doi: 10.1088/1755-1315/794/1/012121.
- [20] N. Beyrouti, "Digital technology management and educational innovation," vol. 51, no. 1, 2017.
- [21] W. Burger and M. J. Burge, *Digital Image Processing An algorithmic introduction using Java*. 2016. doi: 10.1007/978-1-84628-968-2.
- [22] E. Kurniawati, I. Idris, P. Handayati, and S. Osman, "Digital transformation of MSMEs in Indonesia during the pandemic," *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, vol. 9, no. 2, pp. 316–331, Dec. 2021, doi: 10.9770/jesi.2021.9.2(21).
- [23] C. Giunta, "Digital Marketing Platform Tools, Generation Z, and Cultural Consideration," *Journal of Marketing Development and Competitiveness*, vol. 14, no. 2, pp. 63–75, 2020.
- [24] F. Faradillah, E. Ermatita, and D. P. Rini, "Advances in Intelligent Systems Research," 2020.
- [25] F. Faradillah, L. D. Anggraini, E. D. Purnamasari, and M. F. Alie, "PELATIHAN PENGGUNAAN PLATFORM DIGITAL SEBAGAI MEDIA PEMASARAN PADA UMKM KERUPUK KEMPLANG DESA LEMBAK," *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 526–533, Jan. 2023, doi: 10.46576/rjpkm.v4i1.2504.
- [26] A. T. Hidayat, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA LUBUKLINGGAU BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER," *JUSIM (Jurnal Sistem Informasi Musirawas)*.
- [27] A. R. Sabirin and S. Rahma, "SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS LAYANAN PUBLIK PADA KOTA BAUBAU BERBASIS WEB," *Jurnal Informatika*, vol. 9, no. 1, 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.unidayan.ac.id/index.php/JIU/issue/view/9>
- [28] Faradillah, A. A. Zulfikar, and M. S. Hidayatullah, "AYO LAPOR MANG POLISI | Manual Book," Palembang, 2023. [Online]. Available: <https://www.ayolapormangpolisi.com/login>
- [29] M. Pandapotan Damanik Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Jakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika Jl Pegangsaan Timur and B. Jakarta Pusat, "SUMSEL SMART PROVINCE: IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN SUMSEL SMART PROVINCE: IMPLEMENTATION AND READINESS CHALLENGES OF LOCAL GOVERNMENTS IN SOUTH SUMATERA".
- [30] "Permendagri Nomor 90 Tahun 2019".

- [31] B. Sugiantoro, M. Anshari, and D. Sudrajat, "Developing Framework for Web Based e-Commerce: Secure-SDLC," in *Journal of Physics: Conference Series*, Institute of Physics Publishing, Jul. 2020. doi: 10.1088/1742-6596/1566/1/012020.
- [32] E. Bayu Kristanto, S. Andrayana, U. Nasional, J. Sawo Manila, K. Jakarta Selatan, and D. Khusus, "Application of Waterfall SDLC Method in Designing Student's Web Blog Information System at the National University," 2020. [Online]. Available: <https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik>
- [33] W. Nurjaya *et al.*, "Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (Bpmp) Provinsi Jawa Barat," pp. 37–41, 1992.
- [34] M. Inra Takaendengan *et al.*, "Development of an Alumni Data Processing Information System Using the SDLC Modeling System Development Method," 2023.
- [35] P. Februari and) Fitria, "Positif : Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi AUDIT SISTEM KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN ISO 27001 PADA SMKN 1 PUGUNG, LAMPUNG," vol. 5, no. 2, 2019.
- [36] H. Hamrul and N. Zulkarnaim, "Pengembangan Sistem Informasi Pengukur Kesiapan Akreditasi Program Studi 9 Kriteria," *JCIS (Journal of Computer and Information System)*, vol. 4, no. 2, pp. 30–41, 2021, doi: 10.31605/jcis.v4i2.